



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH - PERUBAHAN (RKPD-P) DINAS SOSIAL TAHUN 2022



DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Telp. 0541-661049

T E N G G A R O N G

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Sosial tahun 2022** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun yang mengalami perubahan karena penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurna dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, Juli 2022


Kepala,
H. Hamly, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19640409 198803 1 013

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	15
BAB III RENJA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1 Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah bagian dari dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2022 yang disusun dalam rangka memenuhi beberapa kebutuhan yang belum terakomodir pada Renja PD 2022 akibat dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan memerlukan penyesuaian dengan kondisi dilapangan. Terutama akibat Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan Realikasi dan refocusing Kegiatan serta penyesuaian target capaian kinerja. Selanjutnya dokumen perubahan ini akan digunakan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022. Dokumen ini juga akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan pada tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja PD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
32. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah :

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial ini dimaksudkan sebagai :
 1. Upaya Penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang telah disusun diawal Tahun Perencanaan, yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan.

2. Upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum terakomodir pada Rencana Kerja 2022 dan tambahan untuk kekurangan pembiayaan beberapa kegiatan yang bersifat mendesak.
 3. Upaya Penyesuaian rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial ini bertujuan:
1. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
 2. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. Capai Kinerja Dinas Sosial sampai dengan bulan Juni 2022 atau Triwulan II berdasarkan hasil entry laporan kinerja pada aplikasi e-pantau dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel.1 – Evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.06.1.06.01															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
1.06.01.2.01															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.06.01.2.01.01		Rp81,898,000		Rp12,125,000		Rp6,740,000		Rp0		Rp0		Rp18,865,000		23.03%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
1	1.06.01.2.01.01.01	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	50.00%	70.00%
Jumlah Dokumen															
1.06.01.2.01.06		Rp58,376,984		Rp0		Rp2,460,000		Rp0		Rp0		Rp2,460,000		4.21%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
2	1.06.01.2.01.06.01	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	33.33%	70.00%
Jumlah Dokumen															
1.06.01.2.02															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.06.01.2.02.01		Rp8,979,388,587		Rp2,214,214,207		Rp2,374,410,597		Rp0		Rp0		Rp4,588,624,804		51.10%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
3	1.06.01.2.02.01.01	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	Bulan	50.00%	80.00%
Jumlah Bulan															
1.06.01.2.02.07		Rp166,820,000		Rp0		Rp38,547,500		Rp0		Rp0		Rp38,547,500		23.11%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
4	1.06.01.2.02.07.01	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	Bulan	50.00%	70.00%
Jumlah Bulan															
1.06.01.2.03															
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1.06.01.2.03.05		Rp58,860,000		Rp13,860,000		Rp8,800,000		Rp0		Rp0		Rp22,660,000		38.50%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
5	1.06.01.2.03.05.01	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25.00%	48.00%
Jumah Dokumen															
1.06.01.2.05															
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1.06.01.2.05.03		Rp20,000,000		Rp0		Rp1,010,000		Rp0		Rp0		Rp1,010,000		5.05%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
6	1.06.01.2.05.03.01	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25.00%	26.00%
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian															
1.06.01.2.06															
Administrasi Umum Perangkat Daerah															

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp10,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
7	1.06.01.2.06.01.01 Jumlah Barang	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00%	15.00%
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp59,247,000		Rp59,074,200		Rp0		Rp0		Rp0		Rp59,074,200		99.71%	
8	1.06.01.2.06.02.01 Jumlah Barang	20	Unit	20	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	20	Unit	100.00%	100.00%
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp76,665,500		Rp12,395,000		Rp22,646,000		Rp0		Rp0		Rp35,041,000		45.71%	
9	1.06.01.2.06.04.01 Jumlah Barang	20	Jenis	3	Jenis	4	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	7	Jenis	35.00%	46.00%
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp189,986,600		Rp2,226,500		Rp7,970,100		Rp0		Rp0		Rp10,196,600		5.37%	
10	1.06.01.2.06.05.01 Jumlah Barang	5	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	2	Jenis	40.00%	7.00%
1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material		Rp39,998,000		Rp9,812,000		Rp11,040,000		Rp0		Rp0		Rp20,852,000		52.13%	
11	1.06.01.2.06.07.01 Jumlah Barang	20	Jenis	7	Jenis	6	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	13	Jenis	65.00%	66.00%
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp200,000,000		Rp49,690,800		Rp84,476,094		Rp0		Rp0		Rp134,166,894		67.08%	
12	1.06.01.2.06.09.01 Jumlah Kegiatan	300	Orang/Hari	50	Orang/Hari	0	Orang/Hari	0	Orang/Hari	0	Orang/Hari	50	Orang/Hari	16.67%	71.00%
1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp17,950,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
13	1.06.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip	500	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0	Arsip	0.00%	2.00%
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp353,373,000		Rp0		Rp4,230,000		Rp0		Rp0		Rp4,230,000		1.20%	
14	1.06.01.2.07.06.01 Jumlah Barang	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00%	5.00%
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp2,299,000		Rp2,288,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp2,288,000		99.52%	

Rencana Kerja_PD Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%	
15	1.06.01.2.08.01.01 Jumlah Barang	220	Lembar	220	Lembar	0	Lembar	0	Lembar	0	Lembar	220	Lembar	100.00%	100.00%
1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp193,238,940		Rp50,280,405		Rp40,388,289		Rp0		Rp0		Rp90,668,694		46.92%	
16	1.06.01.2.08.02.01 Jumlah Bulan	12	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	3	Bulan	25.00%	54.00%
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp627,239,060		Rp101,033,632		Rp149,513,305		Rp0		Rp0		Rp250,546,937		39.94%	
17	1.06.01.2.08.04.01 Jumlah Bulan	12	Bulan	3	Bulan	2	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	5	Bulan	41.67%	55.00%
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp70,000,000		Rp4,716,013		Rp27,614,679		Rp0		Rp0		Rp32,330,692		46.19%	
18	1.06.01.2.09.01.01 Jumlah Kendaraan	49	Unit	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	3	Unit	6.12%	46.00%
1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp60,000,000		Rp0		Rp12,800,069		Rp0		Rp0		Rp12,800,069		21.33%	
19	1.06.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan	5	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	20.00%	21.00%
1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp32,000,000		Rp6,650,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp6,650,000		20.78%	
20	1.06.01.2.09.06.01 Jumlah Bulan	12	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	6	Bulan	50.00%	74.00%
1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp370,000,000		Rp0		Rp11,600,000		Rp0		Rp0		Rp11,600,000		3.14%	
21	1.06.01.2.09.09.01 Jumlah Bangunan Yang Direhab	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00%	3.00%
1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp30,000,000		Rp0		Rp1,990,000		Rp0		Rp0		Rp1,990,000		6.63%	
22	1.06.01.2.09.10.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	6.25%	6.00%
RATA-RATA														33.59%	47.05%

Rencana Kerja_PD Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran		VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
					I		II		III		IV					
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
PREDIKAT													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
1.06.1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial																
1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)																
1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			Rp60,000,000		Rp16,640,000		Rp10,098,900		Rp0		Rp0		Rp26,738,900		44.56%	
23	1.06.02.2.01.01.01 Jumlah Lembaga		1	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	60.00%
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp125,000,000		Rp0		Rp8,230,000		Rp0		Rp0		Rp8,230,000		6.58%	
24	1.06.02.2.03.01.01 Jumlah Pekerja Sosial		20	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	35.00%
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp200,000,000		Rp0		Rp12,975,000		Rp0		Rp0		Rp12,975,000		6.49%	
25	1.06.02.2.03.02.01 Jumlah TKSK		20	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	40.00%
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp200,000,000		Rp0		Rp12,250,000		Rp0		Rp0		Rp12,250,000		6.13%	
26	1.06.02.2.03.04.01 Jumlah Lembaga		20	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	30.00%
1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Rp85,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
27	1.06.02.2.03.05.01 Jumlah Lembaga		1	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0.00%	25.00%
RATA-RATA													0.00%	38.00%		
PREDIKAT													SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
1.06.1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan																
1.06.03.2.01 Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																

Rencana Kerja_PD Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Rp100,000,000		Rp9,765,000		Rp28,949,060		Rp0		Rp0		Rp38,714,060		38.71%	
28	1.06.03.2.01.01.01 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5	Orang	16	Orang	23	Orang	0	Orang	0	Orang	39	Orang	780.00%	30.00%
RATA-RATA														780.00%	30.00%
PREDIKAT														SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH
1.06.1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial															
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial															
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan		Rp400,000,000		Rp0		Rp1,219,000		Rp0		Rp0		Rp1,219,000		0.30%	
29	1.06.04.2.01.01.01 Jumlah Penerima Layanan	200	Orang	80	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	80	Orang	40.00%	60.00%
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang		Rp150,000,000		Rp0		Rp3,286,000		Rp0		Rp0		Rp3,286,000		2.19%	
30	1.06.04.2.01.02.01 Jumlah Penerima Layanan	200	Orang	76	Orang	62	Orang	0	Orang	0	Orang	138	Orang	69.00%	40.00%
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu		Rp200,000,000		Rp1,647,200		Rp1,890,000		Rp0		Rp0		Rp3,537,200		1.77%	
31	1.06.04.2.01.03.01 Jumlah Penerima Layanan	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	17.00%
1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp125,000,000		Rp1,185,500		Rp38,926,200		Rp0		Rp0		Rp40,111,700		32.09%	
32	1.06.04.2.01.04.01 Jumlah Penerima Layanan	40	Orang	76	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	76	Orang	190.00%	60.00%
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp152,400,000		Rp0		Rp6,872,000		Rp0		Rp0		Rp6,872,000		4.51%	
33	1.06.04.2.01.05.01 Jumlah Penerima Layanan	100	Orang	76	Orang	40	Orang	0	Orang	0	Orang	116	Orang	116.00%	40.00%
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan		Rp100,000,000		Rp1,535,000		Rp10,600,000		Rp0		Rp0		Rp12,135,000		12.14%	
34	1.06.04.2.01.12.01 Jumlah Penerima Layanan	500	Orang	739	Orang	863	Orang	0	Orang	0	Orang	1,602	Orang	320.40%	55.00%

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%	
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial															
1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp75,000,000		Rp0		Rp8,781,000		Rp0		Rp0		Rp8,781,000		11.71%	
35	1.06.04.2.02.02.01 Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Kedaruratan	25	Orang	1	Orang	20	Orang	0	Orang	0	Orang	21	Orang	84.00%	32.00%
1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan		Rp150,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
36	1.06.04.2.02.03.01 Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Permakanan	75	Orang	59	Orang	5	Orang	0	Orang	0	Orang	64	Orang	85.33%	60.00%
1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang		Rp80,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
37	1.06.04.2.02.04.01 Jumlah PMKS yang memperoleh layanan Sandang	50	Orang	59	Orang	5	Orang	0	Orang	0	Orang	64	Orang	128.00%	60.00%
1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu		Rp29,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
38	1.06.04.2.02.05.01 Jumlah Penerima Alat Bantu	19	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	40.00%
1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp78,200,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
39	1.06.04.2.02.07.01 Jumlah Penerima Layanan	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	40.00%
1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp100,000,000		Rp5,325,000		Rp24,215,060		Rp0		Rp0		Rp29,540,060		29.54%	
40	1.06.04.2.02.12.01 Jumlah Penerima Layanan	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	35.00%
1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
41	1.06.04.2.02.14.01 Lembaga	2	Lembaga	0	Lembaga	2	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	2	Lembaga	100.00%	32.00%
RATA-RATA														87.13%	43.92%
PREDIKAT														TINGGI	SANGAT RENDAH
1.06.1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial															
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar															

Rencana Kerja_PD Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Rp300,000,000		Rp0		Rp10,345,000		Rp0		Rp0		Rp10,345,000		3.45%	
42	1.06.05.2.01.01.01 Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	25	Orang	0	Orang	6	Orang	0	Orang	0	Orang	6	Orang	24.00%	13.00%
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp250,000,000		Rp0		Rp51,954,600		Rp0		Rp0		Rp51,954,600		20.78%	
43	1.06.05.2.02.01.01 Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	49.00%
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp358,797,000		Rp0		Rp8,310,000		Rp0		Rp0		Rp8,310,000		2.32%	
44	1.06.05.2.02.02.01 Jumlah Dokumen Data Terpadu	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00%	52.00%
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp7,215,089,000		Rp30,441,800		Rp55,527,500		Rp0		Rp0		Rp85,969,300		1.19%	
45	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1,500	KK	0	KK	0	KK	0	KK	0	KK	0	KK	0.00%	40.00%
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		Rp220,000,000		Rp0		Rp325,000		Rp0		Rp0		Rp325,000		0.15%	
46	1.06.05.2.02.04.01 Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi	125	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	12.00%
RATA-RATA														4.80%	33.20%
PREDIKAT														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.06.1.06.06 Program Penanganan Bencana															
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota															
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan		Rp300,000,000		Rp7,620,000		Rp10,120,000		Rp0		Rp0		Rp17,740,000		5.91%	
47	1.06.06.2.01.01.01 Jumlah Korban Bencana Yang Memperoleh bantuan Permakanan	1,500	KK	214	KK	624	KK	0	KK	0	KK	838	KK	55.87%	40.00%
1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang		Rp125,000,000		Rp1,210,000		Rp5,859,400		Rp0		Rp0		Rp7,069,400		5.66%	
48	1.06.06.2.01.02.01 Jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan sandang	1,500	KK	214	KK	0	KK	0	KK	0	KK	214	KK	14.27%	40.00%

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota															
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
49	1.06.06.2.02.01.01 Jumlah Kampung Siaga Bencana	4	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0.00%	12.00%
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp100,000,000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0.00%	
50	1.06.06.2.02.02.01 Jumlah Taruna Siaga Bencana	25	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0.00%	12.00%
RATA-RATA														17.53%	26.00%
PREDIKAT														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
1.06.1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan															
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp0		Rp5,659,000		Rp0		Rp0		Rp5,659,000		5.66%	
51	1.06.07.2.01.01.01 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi	1	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0.00%	15.00%
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp80,000,000		Rp22,270,000		Rp10,419,000		Rp0		Rp0		Rp32,689,000		40.86%	
52	1.06.07.2.01.02.01 Jumlah TMP yang Dikelola	2	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0.00%	87.00%
RATA-RATA														0.00%	51.00%
PREDIKAT														SANGAT RENDAH	RENDAH

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2019 adalah tabel sebagai berikut :

**Tabel.2 - Capaian Indikator Kinerja Kunci
Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial
Sampai Dengan Triwulan II dalam Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Kab. yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti x 100	36.33
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Anak Terlantar di Kab. yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti x 100	111.78
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Lanjut Usia Terlantar di Kab. yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti x 100	1.83
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi Gelandangan dan Pengemis di Kab. yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti x 100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / Populasi Korban Bencana alam dan Sosial di Daerah Kabupaten yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten x 100	100

Pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3 - Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2022
Sampai Dengan Triwulan II**

No	Program	Indikator	Anggaran		Pelaksanaan	
			Alokasi	Realisasi	%	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	11.697.340.671	7.389.225.667	63,17	47,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	670.000.000	102.672.576	15,32	38,00
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100.000.000	41.744.060	41,74	30,00
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.714.600.000	246.063.158	14,35	46,80
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.343.886.000	1.080.727.300	12,95	38,00
6		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial				
7	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	625.000.000	92.647.400	14,82	26,00
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang di kelola	180.000.000	79.777.000	44,32	51,00
Total			23.330.826.671	9.032.857.161	38,72	43,50

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
- b) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementerian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban

mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berarti sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah. Selanjutnya terkait dengan 23 Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, keterlibatan Dinas Sosial dalam program kesejahteraan sosial IDAMAN.

4. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadai tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.

- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.



- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
1. Pada tahun anggaran 2022 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 18 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan ada juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.
 3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif APBD 2022 sebesar Rp. 23.330.826.671,- bertambah sebesar Rp. 1.855.422.532,- pada RKPD - Perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat Darurat sehingga total pagu anggaran pada RKPD-Perubahan di tahun 2022 adalah 25.186.249.203,-
- c. Tabel Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2022 dan Perkiraan maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						23,750,520,794	23,330,826,671	25,186,249,203			23,787,006,495					
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Nilai		74,76 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	10,811,920,794	11,697,340,671	11,912,183,203			78 Nilai	10,953,406,495			
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84 Nilai		74.71 Nilai	78 Nilai	78 Nilai	100,000,000	140,274,984	140,274,984			78 Nilai	175,000,000			
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	81,898,000	81,898,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	40,000,000	58,376,984	58,376,984	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Dokumen	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	9,542,748,582	9,146,208,587	9,146,208,587			20 Laporan	9,362,385,997			
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	79 Orang/Bulan	9,422,088,582	8,979,388,587	8,979,388,587	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	79 Orang/Bulan	9,192,385,997	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	120,660,000	166,820,000	166,820,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	170,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	52,800,000	58,860,000	58,860,000						3 Dokumen	52,800,000	
1	06	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	52,800,000	58,860,000	58,860,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah	3 Dokumen	52,800,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05			Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepengawaian	16 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	20,000,000	20,000,000						0 Dokumen	0	
1	06	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawaian	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	0	20,000,000	20,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Dokumen	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan		9 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	202,248,800	593,847,100	653,847,100						7 Layanan	384,341,800	
1	06	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang				50 Unit	50 Unit	5,110,200	10,000,000	10,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Unit	5,110,200	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Unit	30 Paket	59,247,000	59,247,000	89,247,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	30 Paket	59,247,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Jenis	20 Paket	20,000,000	76,665,500	106,665,500	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	20 Paket	40,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	22 Paket	19,986,600	189,986,600	189,986,600	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Paket	19,986,600	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Jenis	22 Paket	29,998,000	39,998,000	39,998,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Paket	29,998,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 OH	450 Laporan	49,957,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	450 Laporan	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	300 Dokumen	17,950,000	17,950,000	17,950,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	300 Dokumen	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	19,536,714	353,373,000	353,373,000					100 Persen	53,162,000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Jenis	125 Unit	19,536,714	353,373,000	353,373,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	125 Unit	53,162,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	767,586,698	822,777,000	902,619,532					12 Bulan	767,516,698		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang				3 Jenis	3 Jenis	2,299,000	2,299,000	2,299,000	Kab. Kutai Kartanegara Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	3 Jenis	2,229,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	193,239,174	193,238,940	213,238,940	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	12 Laporan	193,239,174	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	572,048,524	627,239,060	687,081,592	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	12 Laporan	572,048,524	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	127,000,000	562,000,000	637,000,000					100 Persen	158,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	06	01		2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	49 Unit	70,000,000	70,000,000	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	49 Unit	90,810,000	Dinas Sosial
1	06	01		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	20 Unit	25,000,000	60,000,000	105,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	20 Unit	34,010,000	Dinas Sosial
1	06	01		2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	40 Unit	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	40 Unit	33,380,000	Dinas Sosial
1	06	01		2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0	370,000,000	370,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Sanga-Sanga-Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01		2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	3 Unit	0	30,000,000	30,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	3 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	94 Persen		84 Persen	86 Persen	86 Persen	925,000,000	670,000,000	1,330,000,000						86 Persen	700,000,000	
1	06	02		2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	75,000,000	60,000,000	60,000,000						6 Lembaga	75,000,000	
1	06	02		2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Kembang Janggut, Kelekat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	02		2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	70 orang		70 orang	70 orang	70 orang	775,000,000	610,000,000	1,270,000,000						70 orang	625,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	176 Orang	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	176 Orang	125,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK				18 Orang	18 Orang	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	18 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	64 Lembaga	400,000,000	200,000,000	860,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	64 Lembaga	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga				1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Lembaga	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	100,000,000	100,000,000						100 Persen	50,000,000	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	25 Orang		5 Orang	5 Orang	100 Orang	50,000,000	100,000,000	100,000,000						100 Orang	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,765,000,000	1,714,600,000	2,264,410,000					100 Persen	1,765,000,000		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	1000 Orang		200 Orang	200 Orang	1180 Orang	1,075,000,000	1,127,400,000	1,577,210,000					1180 Orang	1,075,000,000		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	300 Orang	400,000,000	400,000,000	600,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	300 Orang	400,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				200 Orang	130 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	130 Orang	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	50 Orang	200,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100 Orang	125,000,000	125,000,000	374,810,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	100 Orang	125,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	100,000,000	152,400,000	152,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	100 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan				500 Orang	500 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	500 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang 250 orang	Orang 50 orang	50 orang	344 Orang 50 orang	690,000,000	587,200,000	687,200,000							344 Orang 50 orang	690,000,000	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	25 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	25 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	200,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	80,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				19 Orang	19 Orang	60,000,000	29,000,000	29,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	19 Orang	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	100,000,000	78,200,000	78,200,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100 Orang	100,000,000	100,000,000	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	3 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 100 Persen		0 Persen 77 Persen	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	9,373,600,000	8,343,886,000	8,343,886,000					100 Persen 80 Persen	9,393,600,000		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	125 Orang		25 Orang	25 Orang	10 Orang	300,000,000	300,000,000	300,000,000					10 Orang	300,000,000		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	10 Orang	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anak-anak terlantar	10 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,073,600,000	8,043,886,000	8,043,886,000					2 Dokumen	9,093,600,000		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2 Dokumen	400,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	420,000,000	358,797,000	358,797,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	12 Bulan	500,000,000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang				2639 Orang	2639 Orang	7,943,600,000	7,215,089,000	7,215,089,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2639 Orang	7,943,600,000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan				100 Orang	100 Orang	460,000,000	220,000,000	220,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	100 Orang	250,000,000	Dinas Sosial	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	625,000,000	625,000,000	1,055,770,000					100 Persen	675,000,000			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	7500 KK		1500 KK	1500 KK	1500 KK	425,000,000	425,000,000	815,500,000					1500 KK	425,000,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1500 Orang	300,000,000	300,000,000	590,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1500 Orang	300,000,000	Dinas Sosial		
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Orang	125,000,000	125,000,000	225,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Korban Bencana Alam dan Sosial	1000 Orang	125,000,000	Dinas Sosial		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Urusan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	5 Desa/ Kelurahan		4 Desa/Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	200,000,000	200,000,000	240,270,000						1 Desa/Kelurahan	250,000,000		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi				1 Desa/ Kelurahan	1 Kampung	100,000,000	100,000,000	140,270,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	100,000,000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana				30 Desa/ Kelurahan	30 Desa/ Kelurahan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	30 Desa/ Kelurahan	150,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000	180,000,000	180,000,000						100 Persen	250,000,000		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	200,000,000	180,000,000	180,000,000						4 Lokasi	250,000,000		
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	100,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	150,000,000	Dinas Sosial	
TOTAL												23,675,520,794	23,330,826,671	25,186,249,203							23,787,006,495		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, proses penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang agar kelompok penerima manfaat terhadap berbagai program bantuan sosial tepat sasaran.
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi

perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan RENJA tahun 2022 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, Juli 2022


Kepala,
H. Hamly, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19640409 198803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon : 661049 – 661616 Kode Pos : 75512
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P-107.1/DINSOS/SET.II/050/02/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 DAN RENCANA
KERJA (RENJA) TAHUN 2023**
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor RPJMD KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA TAHUN 2021-2026 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / KotaPenerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7);
- 25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023

- pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 3 Pebruari 2022


Kepala,
H. Hamly, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19640409 198803 1 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA
NOMOR : P-107.1/DINSOS/SET.II/050/2/2022 TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 DAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 DAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| a. | Pengarah/Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas |
| b. | Ketua | : | Sekretaris |
| c. | Sekretaris | : | Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan |
| d. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial5. Kepala Sub Bagian Umum dan Tatalaksana6. Sub Koord Kepegawaian7. Sub Koord Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia8. Sub Koord Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang9. Sub Koord Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga10. Sub Koord Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial11. Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial12. Sub Koord Identifikasi dan Penguatan Kapasitas13. Sub Koord Pendampingan Sosial14. Sub Koord Jaminan Sosial Keluarga15. Sub Koord Perlindungan Sosial Korban Bencana |



Kepala,

H. Hamly, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19640409 198803 1 013